

Eks Menteri Andriof Chaniago Dipanggil ke Istana, Bahas Reshuffle?

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andriof A Chaniago ke istana, Selasa (21/2). Apakah bahas reshuffle kabinet?

Andriof mengaku hanya ngobrol dan memberikan saran saat bertemu dengan Jokowi.

"Dalam rangka biasa aja, ya biasa aja ngobrol sama presiden ngasih saran-saran, ngasih ya masukan," kata Andriof saat dihubungi MNC Portal, Selasa (21/2).

Andriof mengaku tidak membahas mengenai isu perombakan atau reshuffle. Termasuk soal mundurnya Zainudin Amali dari kursi

Menpora.

"Enggak cngga ada (bahas reshuffle). Ngomong yang ini aja soal-soal kebijakan aja," ungkapnya.

Andriof mengaku membahas salah satunya mengenai ibu kota Nusantara (IKN). Sisananya, kata Andriof, hanya bertukar pikiran dengan Jokowi.

"IKN iya termasuk salah satunya IKN dan lain-lain juga. Sharing aja bertukar pandangan aja," kata Jokowi.

Dirinya pun tidak menampik siap dipanggil istana, jika Jokowi kembali menyuruh menghadap. "Kalau ada apa dipanggil ya datang, atau saya lagi ada perlu menyampaikan sesuatu ya saya minta waktu," pungkasnya. ● **mei**

KPK Mohon Doa Bisa Tangkap DPO Harun Masiku Cs

JAKARTA (IM) - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mohon doa masyarakat agar pihaknya bisa menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), termasuk Harun Masiku.

Hal ini disampaikan Asep pasca penangkapan Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang menjadi buronan KPK sekitar 7 bulan.

"Kami juga mohon doanya, yang masih belum tertangkap segera bisa kami tangkap, mohon didoakan kembali," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (21/2). Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, pihaknya menerangkan tim pada 17 Februari untuk membuntuti orang yang menjadi penghubung Ricky Ham Pagawak.

"Dan alhamdulillah salah satu doanya dijawab (dika-bulkan)," ujar Asep.

Saat ini KPK masih

memburu tiga orang DPO, di antaranya Harun Masiku, mantan kader PDI Perjuangan. Harun diduga menyuap Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan dengan uang Rp 600 juta. Suap diberikan agar ia bisa menjadi anggota DPR melalui skema pergantian antar waktu (PAW). Namanya masuk DPO per 26 Januari 2020.

Kemudian, Paulus Tannos, salah satu tersangka dalam kasus megakorupsi e-KTP. Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Namanya masuk dalam DPO pada 2019.

Kirana Kotama alias Thay Ming Kirana Kotama merupakan tersangka penyuap Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia, Arif Cahyana, serta Direktur Desain dan Teknologi, merangkap Direktur PT PAL Indonesia, Saeful Anwar. ● **mei**



SIDANG UJI MATERI UU PEMILU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari (kanan) didampingi Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) mengikuti Sidang Uji Materi Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/2). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari KPU dan DPR.

Politisi PKB Sebut Masih Ada Pihak yang Ingin Tunda Pemilu

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebut masih ada pihak yang mendorong agar pemilu ditunda. Hanya saja, Jazilul tak mengungkap secara rinci pihak yang ingin menunda perhelatan limat tahun sekali itu.

"Mudah-mudahan Pemilu 2024 sesuai agenda, dan sesuai jadwal. Sebab masih ada juga, ada yang ingin, dalam tanda kutip, untuk menunda pemilu tahun 2024 ini," sebut Jazilul di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (21/2).

Saat ini proses judicial review atau uji materi soal sistem pemilu proporsional terbuka masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pandangannya, jika MK mengabulkan gugatan pemohon, dan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup maka pencarian bakal calon legislatif yang berkualitas tak relevan.

"Saya para calon (legislatif) ini yang sudah dites ini akhirnya kembali ke nomor urut. Jadi kompetensi dan lain-lain tidak penting, ketika nomor urut itu dilakukan

atau (pemilu berlangsung) dengan sistem tertutup," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengaku telah mencium keberadaan dana cukup besar untuk mengondisikan agar pemilu ditunda.

"Saya kan di parlemen ini kan mencium baunya, harumnya. Mendengar ada, kebisingan ya kan. Seperti itu, itu saja," tutur Benny ditemui Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2) lalu.

Wacana penundaan pemilu memang serius dilakukan. Ia lantas meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran.

Benny menegaskan, bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pesta demokrasi digelar lima tahun sekali.

"Saya minta PPATK buka mata, buka telinga, pasang hidung, cium bau-bau ya. Ya kan mengenai isu penundaan pemilu ya kan gitu," katanya. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BACALEG DPR PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri) berfoto bersama Wakil Ketua Umum PKB Muhammad Hanif Dhakiri (kanan) dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (kedua kanan) serta Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Jazilul Fawaid (kiri) saat mengikuti kegiatan "Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Legislatif DPR PKB" di DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta, Selasa (21/2). DPP PKB menggelar uji kelayakan dan kompetensi Bakal Calon Anggota Legislatif DPR sebagai bentuk komitmen untuk menjaring Calon Anggota Legislatif yang memiliki integritas dan kapabilitas.

PPP Usung Sandiaga di Pilpres 2024, Pengamat: Tak Akan Terwujud

Wacana peleburan KIR dan KIB dimana ada Prabowo yang akan maju di Pilpres 2024, membuat mimpi PPP menca-preskan Sandiaga Uno, buyar.

JAKARTA (IM) - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Mardiono, memperingatkan, Sandiaga Uno, untuk bergabung ke PPP dan menjadi Capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menanggapi hal terse-

but, Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif menyebut, harapan PPP untuk rekrut Sandiaga jadi Capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang, tidak akan terwujud. Ia menilai, peluang PPP untuk mengusung Sandiaga di

Pilpres 2024 akan sia-sia. Apalagi setelah munculnya wacana penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diinisiasi oleh Gerindra dan PKB, kemudian dileburkan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi oleh PPP, PAN dan Golkar.

"Harapan PPP untuk menarik Sandiaga Uno tidak akan terwujud, apalagi keinginan PPP untuk mengusung Sandiaga Uno di Pilpres 2024 akan buyar, terlebih munculnya wacana peleburan KIR dan KIB dimana ada Pak

Prabowo yang akan maju di Pilpres 2024. Sejahtuh ini Sandiaga Uno masih tunduk dan patuh pada pencapresan Pak Prabowo, alhasil rayuan PPP untuk menarik Sandiaga Uno sebagai kader partai tidak akan terwujud ibarat bertepuk sebelah tangan," kata Arif dalam keterangannya, Selasa (21/2).

Sandiaga Uno sering diisukan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Memang sejauh ini kepatuhan Sandiaga kepada Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai nominasi Bakal Capres patut dipertanyakan.

"Sejahtuh ini memang tidak ada pernyataan resmi dari Sandiaga Uno untuk tertarik bergabung ke PPP, meskipun secara tersirat dari manuver politik Sandiaga ke PPP bisa dibaca ada keinginan untuk

bergabung ke PPP. Jadi patut dipertanyakan sebenarnya apa yang diinginkan Sandiaga Uno ketika menerima tawaran PPP untuk maju di Pilpres 2024, namun tidak memperlihatkan keinginan untuk bergabung dengan PPP," ujarnya.

Menurutnya, usaha PPP untuk mengusung Sandiaga di Pilpres 2024 akan kandas, apalagi setelah munculnya wacana peleburan KIR dan KIB jadi koalisi besar.

"PPP akan semakin cecwa karena sejauh ini Sandiaga Uno masih menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Prabowo. Menurut saya langkah kongkrit yang harus ditempuh PPP adalah secara terang-terangan menarik Sandiaga Uno jadi kader partai, bukan hanya sebatas menunjuk Sandiaga sebagai nominasi kandidat di Pilpres 2024," katanya. ● **han**

Zainudin Mundur sebagai Menpora, Jokowi: Secara Informal Sudah

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali secara informal sudah mengajukan pengunduran diri. Namun, pengunduran diri secara resmi belum dilakukan.

"Secara resmi belum. Tertulis belum. Informal sudah (mengajukan pengunduran diri)," kata Jokowi usai meninjau normalisasi kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (21/2).

Jokowi pun enggan membeberkan lebih jauh terkait sosok yang akan menggantikan posisi Zainudin dari kursi Menpora.

"Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara," kata Jokowi. Sebagaimana diketahui, Menpora Zainudin Amali mengaku telah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk fokus mengurus sepakbola.

Hal tersebut menyusul dirinya yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI.

"Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada pak presiden terus juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua umum PSSI

Dan beliau menyerahkan kepada saya karena

saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih," kata Zainudin di Kantor Presiden, Senin (20/2).

Zainudin menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi bahwa akan fokus terhadap sepakbola.

"Dan saya sampaikan kepada pak presiden, bapak saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepakbola menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepakbola," kata Zainudin. ● **mei**



PENYERAHAN BANTUAN PRESIDEN UNTUK KORBAN GEMPA BUMI DI JAYAPURA

Penjabat (PJ) Wali Kota Jayapura Frans Pekey (kanan kedua) didampingi Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor Mackbon (kanan) menyerahkan secara simbolis bantuan presiden kepada masyarakat terdampak gempa bumi di posko tanggap darurat bencana gempa bumi, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/2). Sebanyak 1.229 kepala keluarga dari 15 kelurahan Kota Jayapura mendapatkan bantuan sembako dari presiden untuk meringankan beban para korban terdampak gempa yang terjadi pada 9 Januari 2023 lalu.

Susuri Hutan Papua, Brigjen JO Sembiring Temukan Jejak Kapten Philips Mark Mahrtens

JAKARTA (IM) - Pilot Susi Air tersebut. Dedi menjelaskan bahwa sampai saat ini, Kapolda Papua Iren Mathius Fakhri bersama Komandan Krom 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring dan pemerintah setempat tengah melakukan mediasi dengan pendekatan soft approach dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tapi sekali lagi rekan-rekan, Kapolda, Pangdam, dan Danrem, yang paling utama adalah menggunakan pendekatan soft approach, ya, tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh gereja dan bupati terus berkomunikasi dengan pihak KKB untuk sedapatnya dengan pendekatan yang lunak bisa diserahkan," ujar Dedi. ● **han**

Operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mahrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di Papua pimpinan Egi-anus Kogoya, masih terus berlanjut.

Komandan Resor Militer 172/PWY Brigjen JO Sembiring yang memimpin langsung operasi pembebasan, telah menemukan jejak Warga Negara Selandia Baru tersebut di hutan rimba Papua.

Pasukan Satgas Dama Cartenz juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kamera, handphone atau ponsel, serta sejumlah peralatan pribadi yang diduga milik Kapten Philips.

Jenderal bintang satu yang pernah memimpin Grup 3/Sandi Yudha Kopassus ini memastikan, keamanan di Distrik Sururu, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, berangsur-angsur kondusif.

"Memang benar kondisi di Sururu semakin kondusif sehingga masyarakat mulai kembali ke kampung dan mendiami rumahnya," kata JO Sembiring, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Iren Dedi Prasetyo, mengatakan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya kamera, handphone atau ponsel, serta sejumlah peralatan pribadi yang diduga milik

PT BANGUN HIJAU JAYA, suatu perseorangan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseorangan") dengan ini mengumumkan bahwa:

PT BANGUN HIJAU JAYA, akan mengalihkan 65% (enam puluh lima persen) saham kepada Tuan Raden Mas DIDOT PHUDI HERIANTO Melalui pembelian dan pengalihan saham langsung dari pemegang saham.

Segala permintaan informasi dan/atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor (jika ada) terhadap rancangan pengalihan ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:

PT BANGUN HIJAU JAYA
Jalan Panjang Nomor 21A, RT 012 RW 005,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
Jakarta, 22 Februari 2023
Direksi PT BANGUN HIJAU JAYA